

## EFEKTIVITAS KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA BAGI PEMBANGUNAN EKONOMI PERDESAAN

Rita Kusmunawati<sup>1</sup>, Syafruddin<sup>2\*</sup>

<sup>12</sup>Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: [syafagent@gmail.com](mailto:syafagent@gmail.com)

Article Info	Abstrak
<b>Article History</b> Received: 14 March 2023 Revised: 29 April 2023 Published: 30 April 2023	<p><i>This study aims to determine the effect of village fund allocation policies on rural economic development in Luk Village, Rhee Sub-District, Sumbawa District. This type of research is associative research which aims to determine the relationship or influence between two or more variables. The type of data used is quantitative data obtained from the results of scoring on respondents' answers related to research problems. Data obtained directly from respondents through a questionnaire. This research is a sample research, in which researchers took a sample of 95 people as representatives of a total population of 1,940 people. The data that has been collected is processed using the SPSS program for further analysis and interpretation using simple linear regression analysis techniques, partial parameter hypothesis testing (t test), and determination coefficient test (<math>R^2</math>). The results showed that the village fund allocation policy had a positive and significant effect on rural economic development in Luk Village, Rhee Sub-District, Sumbawa District. That is, the greater the allocation of village funds in development, the rural economic growth in Luk Village, Rhee Sub-District, Sumbawa District will also increase, and vice versa. The ability of village fund allocation policy variables to explain variations in changes in rural economic development variables in Luk Village, Rhee Sub-District, Sumbawa District is 35.6%, while the remaining 64.4% is influenced by other variables outside this research model.</i></p>
<b>Keywords</b> Causality Analysis; Allocation of Village Funds; Rural Economic Development.	

### PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembangunan desa. Desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi, politik yang perlu mendapat perhatian khusus dan serius dari pemerintah. Perencanaan pembangunan selama ini menjadikan masyarakat desa sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan. Padahal Desa memiliki hak asal usul tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Upaya-upaya pembangunan masyarakat telah dilakukan oleh Pemerintah Desa baik sebelum maupun setelah adanya dana desa. Hal ini dibuktikan dengan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam rangka membahas pembangunan yang progresif, efektif dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat tidak hanya diajak untuk merencanakan pembangunan desa, tetapi juga dalam hal pelaksanaannya. Dalam konteks ini, masyarakat menjadi subyek utama dalam membangun infrastruktur desa. Dari kegiatan tersebut masyarakat juga akan mendapatkan upah yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tujuan utama pembangunan adalah untuk menaikkan tingkat hidup dan kesejahteraan rakyat. Dapat pula dikatakan pembangunan bertujuan untuk menaikkan mutu hidup rakyat. Oleh karena itu, pembangunan fisik dan pembangunan nonfisik perlu disinergikan agar tujuan utama pembangunan dapat tercapai. Dalam perjalanan

ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera (Tangkumahat et al., 2017).

Dewasa ini, paradigma penyelenggaraan pemerintah telah mengalami perubahan dari sistem terpusat menuju sistem desentralisasi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa perubahan mendasar pada posisi dan mitra desa dalam pemanfaatan wilayah dan pemerintahan yang baik berdasarkan aspek kewenangan, perencanaan, pembangunan keuangan dan demokrasi desa. Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal daerah dituntut untuk meningkatkan daya saing sehingga diharapkan desa mampu mandiri. Artinya desa dapat membangun wilayahnya sesuai dengan kemampuannya dan dapat mensejahterakan masyarakatnya melalui usaha-usaha yang telah diprogramkan oleh Pemerintah.

Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal daerah, desa diharapkan mampu mandiri. Paradigma bahwa desa yang mandiri adalah desa yang mampu menerapkan program dana desa, sebagaimana yang dicanangkan pemerintah yakni empat prioritas pembangunan di desa diantaranya embung desa, produk unggulan desa, BUMDes dan lapangan olah raga yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui perluasan lapangan kerja dan peluang usaha masyarakat desa. Program-program tersebut dapat mencegah urbanisasi, dan desa dapat menggali potensi yang belum dibangun, atau mengembangkan kembali usaha-usaha yang sudah ada (Jumiati dan Adam, 2020).

Strategi kebijakan pembangunan Indonesia adalah meningkatkan pemerataan pembangunan yang beserta hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan lintas sektoral terutama di daerah pedesaan. Hal ini telah membuka peluang bagi pemerintah daerah dan desa untuk bertanggung jawab untuk mengelola masing-masing kepentingan daerah. Otonomi daerah adalah solusi dalam menangani berbagai masalah yang terjadi karena masalah disparitas (ketimpangan) pembangunan baik antara pusat dan daerah yang terjadi akibat dari pembangunan yang tidak merata yang mengakibatkan tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia (Badrudin dan Kuncorojati, 2017).

Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pedesaan adalah ujung tombak pembangunan regional dan nasional. Oleh karena itu, untuk mencapai pertumbuhan yang adil dan pembangunan ekonomi, pembangunan di Indonesia harus dimulai dari pedesaan. Pembangunan desa merupakan sebagai gerakan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan yang dilandasi kesadaran untuk meningkatkan kehidupannya yang lebih baik dan kehidupan yang layak. Namun, Untuk menjalankan wewenangnya dalam mengatur dan mengelola pemerintahan dan kepentingan rakyat, desa-desa membutuhkan sumber pendapatan. Pendapatan desa adalah sumber daya vital untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan desa. Dana desa merupakan salah satu wujud pedulian Negara dalam membantu pembangunan perekonomian desa (Rimawan dan Aryani, 2019).

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Alokasi dana desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program-program desa. Salah satu tujuannya adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Dalam penggunaannya, 30% ADD digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintah desa dan 70% digunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat (Abidin, 2015).

Pemberian Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang. Melalui Dana Desa (DD), desa berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Dana Desa akan mendorong peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa apabila diaktifkan secara intensif dan efektif. Pembangunan pedesaan sebagai sasaran pembangunan, guna untuk mengurangi berbagai kesenjangan desa dan kota dan peningkatan perekonomian di Desa. Pertumbuhan desa yang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi dan demokratisasi, pemberdayaan masyarakat. Peran pemerintah desa ditingkatkan dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dan wilayah.

Pemberian dana desa diharapkan menjadi stimulus bagi kemandirian masyarakat desa dalam melakukan pembangunan di wilayahnya. Jika Dana Desa dikelola dengan baik, masa depan desa akan mampu bersaing dan lebih mandiri. Dana desa dapat memberikan tambahan modal bagi desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah berharap kebijakan Alokasi Dana Desa ini bisa mendorong terlaksananya pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat desa dan menjaga peningkatan ekonomi di tingkat desa. Hadirnya Alokasi Dana Desa, desa mempunyai kepastian pembiayaan sehingga perbaikan bisa dilanjutkan tanpa perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan anggaran bantuan dari pemerintah pusat.

Jika kita berbicara masalah pembangunan, maka kita tidak akan terlepas dari pembangunan infrastruktur, yang mana secara umum dapat dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan syarat perlu dalam pembangunan, tidak terkecuali pembangunan pertanian dan pedesaan. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek vital dan memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pengembangan sektor ini menjadi tumpuan pembangunan ekonomi.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar Otonomi daerah, Desa semakin membutuhkan adanya pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih terwujud dalam pembangunan daerah. Dampak eksklusif yang dirasakan oleh rakyat, yaitu dengan dikeluarkannya kebijakan dana desa yang lebih memfokuskan pada pembangunan infrastruktur sehingga membuat rakyat lebih terbantu misalkan pada hal pembuatan jalan, mampu mempermudah petani mengakses jalan dengan mudah.

Setiap Desa dipastikan mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah yang disebut Dana Desa, dan salah satu desa yang mendapatkan alokasi dana desa adalah Desa Luk Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa yang menjadi lokasi penelitian. Adanya bantuan dana desa yang diperoleh memberikan peluang bagi Desa Luk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 tersebut menjadikan setiap desa harus mampu menjadi maju dalam semua hal, termasuk dalam pembangunan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Namun kenyataannya Desa Luk belum mampu sepenuhnya menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan yang diharapkan. Implementasi program pembangunan menggunakan anggaran dana desa yang bertujuan untuk pengembangan perekonomian masyarakat desa di Desa Luk masih belum merata. Program pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk menggali potensi yang belum dibangun atau mengembangkan kembali usaha-usaha yang sudah ada guna mencegah arus urbanisasi juga belum dapat diwujudkan sepenuhnya oleh masyarakat desa. Program dana desa yang salah penempatannya menyebabkan usaha-usaha yang ada di desa bahkan yang sudah turun temurun dikerjakan oleh masyarakat desa menjadi tidak lagi produktif sehingga menyebabkan perekonomian masyarakat desa semakin menurun. Hal ini sejalan dengan Akbar (2018) yang menyatakan bahwa program dana desa yang salah penempatannya menyebabkan usaha-usaha yang sudah di desa ditinggalkan oleh masyarakat untuk bekerja di kota.

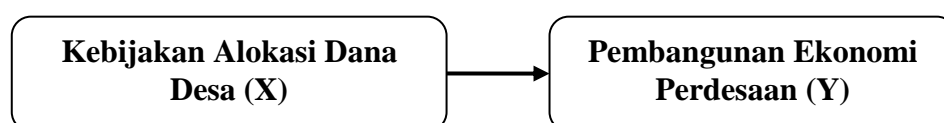
Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan alokasi anggaran dana desa di Desa Luk Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa belum dilaksanakan secara optimal sehingga belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan perekonomian perdesaan. Oleh karenanya, dalam pengalokasian dana desa, pemerintah pusat harus terlebih dahulu melihat apakah suatu desa yang akan diberikan bantuan sudah siap dalam pelaksanaan dana desa. Karena apabila tidak ada kesiapan dari desa tersebut akan menemui banyak kendala, salah satunya adalah terjadinya kesalahan dalam pengalokasian dana desa yang tidak sesuai dengan sasarannya. Padahal dana desa tersebut jika diimplementasikan dengan baik akan dapat memberikan dampak yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat desa.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan alokasi dana desa di Desa Luk Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada sehingga memberikan dampak terhadap pembangunan perekonomian desa. Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat alokasi dana desa merupakan hal utama dalam menunjang pembangunan desa. Adanya program dana desa menjadi sebuah momentum dalam melaksanakan pengembangan pembangunan fisik dan non fisik desa serta pemberdayaan desa dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, diperlukan partisipasi semua pihak, terutama bagaimana peran dari kepala desa dan aparat pemerintah desa agar mampu mengalokasikan dana desa ini secara tepat bagi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Menurut Rusiadi, *et al.*, (2016), penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Adapun variabel yang akan dikaji pengaruhnya dalam penelitian ini adalah kebijakan alokasi dana desa sebagai variabel independen (bebas), dan pembangunan ekonomi perdesaan sebagai variabel dependen (terikat). Adapun gambar alur penelitian ini disajikan sebagai berikut.



**Gambar 1. Desain Penelitian**

### Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka-angka atau data kualitatif yang diangkakan (*scoring*) (Sugiyono, 2019). Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa data hasil pemberian skor (*scoring*) atas jawaban responden terkait permasalahan penelitian yang ditanyakan melalui kuesioner.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber aslinya (tanpa melalui perantara) (Suryabrata, 2018). Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari responden penelitian, yaitu masyarakat dan pemerintah Desa Luk Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa.

### Populasi dan Sampel

Menurut Arikunto (2019) populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Berdasarkan pandangan tersebut, maka populasi dalam penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat dan pemerintah Desa Luk Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa, jumlah masyarakat dan pemerintah Desa Luk Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa adalah sebanyak 1.940 orang.

Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti (Arikunto, 2019). Apabila subyek penelitian kurang dari 100 orang, lebih baik diambil semuanya, sehingga penelitiannya disebut penelitian populasi. Akan tetapi, bila subyeknya lebih dari 100 orang, maka diperbolehkan untuk mengambil sampel sebagai perwakilan. Untuk menghitung besarnya sampel digunakan rumus Slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Tingkat kelonggaran (10%).

Berikut perhitungan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin.

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{1 + Ne^2} \\ &= \frac{1.940}{1 + 1.940 (0,1)^2} \\ &= \frac{1.940}{1 + 19,4} \\ &= \frac{1.940}{20,4} \\ &= 95,05 \text{ (95 dibulatkan)} \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, diketahui nilai  $n = 95,05$  sehingga dalam peneliti ini jumlah sampel yang akan diambil menjadi responden penelitian adalah sebanyak 95 orang. Penentuan responden dipilih secara *accidental sampling*, yaitu metode penentuan sampel dengan mengambil responden yang secara kebetulan ada di tempat sesuai dengan konteks penelitian (Notoatmodjo, 2018).



## Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada peneliti ini menggunakan kuesioner. Kuesioner menurut Sujarweni (2020) merupakan suatu instrumen pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada para responden untuk mereka jawab. Pengumpulan untuk data primer, peneliti menggunakan kuesioner dengan beberapa alternatif jawaban berupa *skala likert*. *Skala likert* adalah skala untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Adapun bobot penilaian yang digunakan untuk mengukur dengan *skala likert*, yaitu 1 = sangat tidak setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Kurang Setuju, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju (Sujarweni, 2020).

## Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah kebijakan alokasi dana desa (X), sedangkan variabel dependennya adalah pembangunan ekonomi perdesaan (Y). Seluruh data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan diolah dengan menggunakan bantuan program SPSS (Ghozali, 2021). Output SPSS berupa hasil akan dianalisis dan diinterpretasikan menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana, uji hipotesis parameter parsial (uji t), dan uji koefisien determinan ( $R^2$ ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Analisis Data

#### 1. Uji Regresi Linear Sederhana

Pengujian regresi linear sederhana dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kebijakan alokasi dana desa (X), sedangkan variabel dependennya adalah pembangunan ekonomi perdesaan (Y). Hasil pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan uji regresi linier sederhana disajikan sebagai berikut.

**Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10.897	2.457	.597	4.435	.000
Kebijakan Alokasi DD	.601	.084		7.174	.000

a. Dependent Variable: Pembangunan Ekonomi Perdesaan

Sumber: Output Hasil Olah Data SPSS, 2023.

Berdasarkan hasil pengujian regresi linear sederhana yang disajikan dalam tabel di atas, maka dapat dikembangkan sebuah model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X + e$$

$$Y = 10.897 + 0.601 (X) + e$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Nilai konstanta adalah sebesar 10.897, menunjukkan bahwa apabila nilai variabel kebijakan alokasi dana desa tidak mengalami perubahan atau bernilai konstan 0 (nol), maka nilai konsisten variabel pembangunan ekonomi perdesaan Desa Luk Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa adalah sebesar 10.897.

b. Koefisien  $\beta$  kebijakan alokasi dana desa (X) adalah sebesar 0.601. Artinya, jika terjadi peningkatan pada nilai variabel kebijakan alokasi dana desa sebesar satu satuan, maka nilai variabel pembangunan ekonomi perdesaan Desa Luk Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa juga akan meningkat sebesar 0.601. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan hubungan searah, yang berarti bahwa semakin besar alokasi dana desa dalam pembangunan, maka pertumbuhan ekonomi perdesaan di Desa Luk Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa juga akan meningkat, demikian pula sebaliknya.

## 2. Uji Hipotesis Parameter Individual (Uji t)

Uji-t digunakan untuk menguji apakah variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kebijakan alokasi dana desa (X), sedangkan variabel dependennya adalah pembangunan ekonomi perdesaan (Y). Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  dan dengan melihat nilai signifikansi yang dihasilkan. Jika nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  ( $t_{hitung} > t_{tabel}$ ) dan nilai signifikansi hasil perhitungan lebih kecil dari 0,05 ( $sig. < 0,05$ ), maka terdapat pengaruh yang signifikan variabel independen terhadap variabel dependen. Demikian pula sebaliknya.

Berdasarkan pengujian hipotesis parameter parsial (uji t) dengan bantuan aplikasi SPSS, diperoleh hasil yang disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constanta)	10.897	2.457	.597	4.435	.000
Kebijakan Alokasi DD	.601	.084		7.174	.000

a. Dependent Variable: Pembangunan Ekonomi Perdesaan

Sumber: Output Hasil Olah Data SPSS, 2023.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis parameter parsial (uji-t) dengan bantuan aplikasi SPSS yang ditunjukkan pada tabel 2 tersebut, diperoleh nilai  $t_{hitung}$  adalah sebesar 7.174, sedangkan nilai  $t_{tabel}$  pada tingkat derajat kebebasan ( $df = n - k = 95 - 2 = 93$ ) dan  $\alpha = 5\%$  (0,05) adalah sebesar 1.985, sehingga nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari pada nilai  $t_{tabel}$  ( $7.174 > 1.985$ ). Sedangkan nilai signifikan yang dihasilkan adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai minimal taraf signifikansi yang disyaratkan 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Hal ini berarti bahwa kebijakan alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi perdesaan di Desa Luk Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa.

## 3. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai *R-Square*. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat kecil, dan nilai  $R^2$  yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Berikut disajikan hasil perhitungan koefisien determinasi ( $R^2$ ) menggunakan bantuan aplikasi SPSS.

**Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.597 <sup>a</sup>	.356	.349	4.118809
a. Predictors: (Constant), Kebijakan Alokasi DD				
b. Dependent Variable: Pembangunan Ekonomi Perdesaan				

Sumber: Output Hasil Olah Data SPSS, 2023.

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang terdapat pada nilai *R Square* adalah sebesar 0,356. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel kebijakan alokasi dana desa dalam menjelaskan variasi perubahan variabel pembangunan ekonomi perdesaan di Desa Luk Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa adalah sebesar 35,6%, sedangkan sisanya 64,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

### Pembahasan

Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal daerah, desa diharapkan mampu mandiri. Artinya desa dapat membangun wilayahnya sesuai dengan kemampuannya dan dapat mensejahterakan masyarakatnya melalui usaha-usaha yang telah diprogramkan oleh Pemerintah. Dengan dikucurkannya dana desa, Pemerintah desa harus mampu merencanakan, mengorganisir, mengaktualisasikan dan mengendalikan program-program tersebut. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah pusat memberikan bantuan dalam bentuk dana desa yang dimaksudkan sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa.

Namun dalam pengalokasian dana desa, pemerintah pusat harus terlebih dahulu melihat apakah suatu desa yang akan diberikan bantuan sudah siap dalam pelaksanaan dana desa. Karena apabila tidak ada kesiapan dari desa tersebut akan menemui banyak kendala, salah satunya adalah terjadinya kesalahan dalam pengalokasian dana desa yang tidak sesuai dengan sasarannya. Padahal dana desa tersebut jika diimplementasikan dengan baik akan dapat memberikan dampak yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat desa.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan alokasi dana desa di Desa Luk Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada sehingga memberikan dampak terhadap pembangunan perekonomian desa. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa kebijakan alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi di Desa Luk Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa. Artinya, semakin besar alokasi dana desa dalam pembangunan, maka pertumbuhan ekonomi di Desa Luk Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa juga akan meningkat, demikian pula sebaliknya.

Setiap Desa dipastikan mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam kebijakan alokasi dana desa, prioritas penggunaan dana desa lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur. Kebijakan ini sejalan dengan keinginan masyarakat untuk lebih fokus pada pembangunan fisik, seperti pembangunan jalur transportasi, gedung olah raga, dan lain-lain. Hal itu dikarenakan dengan adanya dukungan infrastruktur transportasi yang memadai, maka akan mempermudah petani dalam mengakses jalan tersebut sehingga kegiatan pertanian dapat berjalan dengan lancar serta dapat bermanfaat dalam penciptaan lapangan pekerjaan. Dengan demikian, maka akan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.



Hasil penelitian ini sesuai dengan pandangan Prasetyo dan Masdjojo (2014), yang menyatakan bahwa alokasi dana desa adalah anggaran yang digunakan oleh pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat dan mengimplementasikan pembangunan yang dikelola langsung oleh desa dan masyarakat. Kegiatan ini menghasilkan pembangunan berbagai fasilitas umum seperti jalan, jembatan, telekomunikasi, listrik, gedung sekolah dan rumah sakit, pasar dan berbagai fasilitas umum lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Kegiatan pembangunan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Faisal Nofian (2018) tentang Analisis Dampak Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Ekonomi Pedesaan di Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program dana desa memiliki peran dalam penambahan sarana dan prasarana fisik di pedesaan. Dengan adanya infrastruktur dan fasilitas baru yang dibangun melalui dana desa, kesejahteraan masyarakat meningkat dan ketimpangan pendapatan masyarakat menurun.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi perdesaan di Desa Luk Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa. Artinya, semakin besar alokasi dana desa dalam pembangunan, maka pertumbuhan ekonomi perdesaan di Desa Luk Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa juga akan meningkat, demikian pula sebaliknya. Kemampuan variabel kebijakan alokasi dana desa dalam menjelaskan variasi perubahan variabel pembangunan ekonomi perdesaan di Desa Luk Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa adalah sebesar 35,6%, sedangkan sisanya 64,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

## SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini dapat dikemukakan beberapa saran berdasarkan hasil penelitian ini, yaitu:

### 1. Bagi Pemerintah Desa

Bagi pemerintah desa kepala desa maupun BPD (badan permusyawaratan desa) harus lebih peka terhadap kebutuhan desa dan masyarakat desa. Untuk dapat mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat, pemerintah desa harus bersikap netral (tidak memihak pada kepentingan sendiri dan kelompoknya) dalam infrastruktur dan fasilitas desa sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara merata.

### 2. Bagi Masyarakat

Diperlukannya kemitraan antara pemerintah dan masyarakat desa dalam pembangunan ekonomi perdesaan, maka masyarakat diharapkan dapat aktif berpartisipasi dan berkontribusi dalam setiap program yang dilakukan oleh pemerintah desa, serta masyarakat juga turut serta dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa (tidak apatis).

## DAFTAR PUSTAKA

Abidin, M.Z. (2015). Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 6(1): 61-76.

- Akbar, D.S. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) (Penelitian Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Sadananya). *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi)*, Vol. 5(2): 109-120.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Badrudin, R., & Kuncorojati, I. (2017). The Effect of District Own-Source Revenue and Balance Fund on Public Welfare by Capital Expenditure and Economic Growth as an Intervening Variable in Special District of Yogyakarta. *Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 19(1): 54-59.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 (Edisi 10)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jumiati, E., & Adam, D. (2020). Pengaruh Program Dana Desa Terhadap Perekonomian Masyarakat, Perluasan Lapangan Kerja dan Peluang Usaha Masyarakat Desa (Studi Deskriptif Korelasi pada 10 Desa di Kabupaten Purwakarta). *Lisyabab Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 1(2): 195-210.
- Nofian, M.F. (2018). Analisis Dampak Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Ekonomi Pedesaan di Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 1(2): 349-359.
- Notoadmojo, S. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- Prasetyo, Y., & Masjojo, G.N. (2014). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di 10 Desa Wilayah Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1(6): 302-319.
- Rimawan, M., & Aryani, F. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Serta Kemiskinan Di Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 9(3): 287-295.
- Rusiadi, Subiantoro, N., & Hidayat, R. (2016). *Metode Penelitian: Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan. Konsep, Kasus dan Aplikasi SPSS, Eviews, Amos, Lisrel*. Medan: USU Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V.W. (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suryabrata, S. (2018). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Tangkumahat, F.V., Panelewen, V.V.J., & Mirah, A.D.P. (2017). Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Dan Ekonomi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Agri-Sosio Ekonomi Unsrat*, Vol. 13(2A): 335-342.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.